



Membangun Perspektif Baru dari Hulu ke Hilir: Kolaborasi Membangun Ruang Aman bagi Perempuan di Media Massa

Ayu Prawitasari

Abstrak

Banyak pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di media massa, khususnya pencabulan dan pemerkosaan, menunjukkan bias yang merugikan korban. Publikasi tinggi ini tampak menguntungkan di permukaan, namun sejatinya justru mengamplifikasi stereotip yang menghakimi perempuan sebagai korban. Sebagai fasilitator kelas kesetaraan gender untuk jurnalis sekaligus pengajar di perguruan tinggi, saya memetakan persoalan ini dalam dua lokus: hulu (pemberitaan aspek preventif dan edukatif) dan hilir (pemberitaan kasus yang berperspektif korban).

Saya menilai banyaknya pelatihan menulis untuk jurnalis yang berperspektif korban kekerasan seksual belum efektif dalam mengatasi pemberitaan yang bias. Masalah berat di hulu, terutama minimnya perspektif jurnalis perihal keadilan dan kesetaraan gender relatif dibiarkan tanpa penanganan memadai. Analoginya seperti kasus kebakaran. Perhatian sejumlah pihak masih lebih banyak terpusat pada bagaimana cara memadamkan api, bukan pada cara mencegah timbulnya api berbahaya. Ini terlihat dari bagaimana media di hulu menggambarkan perempuan sebagai tubuh, bukan kepala, seperti pada diksi dan kalimat “dokter cantik” atau “polisi cantik” (stereotip), “tidak melupakan kodrat perempuan memelihara keluarga (beban ganda), “izin suami” (subordinasi), atau “janda kembang” (kekerasan).

Sebagai jurnalis, saya mengusulkan inovasi dalam konten pemberitaan yang berupa panduan pemberitaan yang adil; kampanye edukasi; serta pelatihan bagi jurnalis dan editor yang bertujuan menghapus bias gender dalam pemberitaan. Panduan ini idealnya dilakukan secara kolaboratif oleh Komnas Perempuan dengan melibatkan banyak lembaga, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers, serta organisasi pers. Inovasi yang saya usulkan menekankan pada pentingnya pencegahan di tingkat hulu dengan mengubah narasi media yang sangat maskulin dan sensasional serta memastikan representasi yang adil dan setara bagi perempuan. Dengan terciptanya media sebagai ruang yang aman bagi perempuan, saya berharap marwah media untuk mengedukasi publik bisa tercapai sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan bisa ditekan.

Kata Kunci: *Media Massa, Bias, Stereotipe, Panduan*



Maraknya pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, hingga dalam salah satu bentuknya yang paling merusak berupa pemerkosaan, pada satu sisi menunjukkan perhatian media massa yang begitu besar terhadap situasi ini. Namun, sisi paradoksnya adalah, alih-alih berempati maupun mendukung korban, para jurnalis justru menggunakan diksi yang merendahkan penyintas, yang mayoritas perempuan. Sebagai jurnalis sekaligus fasilitator kelas kesetaraan gender untuk jurnalis, saya melihat, minimnya pemahaman sekaligus kurang memadainya pengetahuan para jurnalis mengenai keadilan dan kesetaraan gender menjadi salah satu penyebab munculnya kesenjangan ini. Situasi inilah yang mendorong saya mengusulkan inovasi dalam bentuk panduan pemberitaan yang berperspektif gender untuk mempersempit kesenjangan sekaligus menciptakan media massa sebagai ruang yang aman bagi perempuan.

Saya memberi garis tebal pada frasa ruang aman karena menurut saya memang akan memunculkan banyak pertanyaan, seperti: Apabila saya berharap media massa menjadi ruang yang aman bagi para perempuan, lantas bagaimana dengan kondisi media massa selama ini? Apakah media memang belum cukup ramah terhadap perempuan? Atau, apakah media massa bahkan bukan ruang yang aman? Atau, mungkinkah media massa justru membahayakan perempuan? Jangan-jangan, media bukan tempat yang tepat bagi perempuan?

Pertanyaan lain yang lebih kritis lagi, seperti, jika media massa bukan tempat yang tepat untuk perempuan, di manakah lantas para jurnalis perempuan itu sekarang berada? Bagaimana mereka menjalankan fungsi mereka secara lebih sensitif dan empatik? Di mana dan seberapa besar suara dan kekuatan mereka sebenarnya? Atau, bagaimana posisi jurnalis laki-laki dalam hal ini? Apakah kepentingan mereka memang selalu berseberangan dengan jurnalis perempuan saat merepresentasikan kelompok perempuan di media massa? Lebih jauh lagi, apakah mereka semua gagal menghilangkan prasangka dan diskriminasi terhadap perempuan? Lalu, bagaimana kita menerjemahkan Peraturan Dewan Pers No. 02/Peraturan-Dp/Iv/2024 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pers dalam situasi saat ini?

Ada banyak perspektif untuk menjawab berbagai pertanyaan reflektif itu. Kita mulai dengan membahas sebuah berita di *JNN.com* yang berjudul *Harta Sudah di Tangan, tetapi Tubuh Janda Bikin Enggak Tahan*. Berita ini ditulis Budianto Hutahaean, jurnalis laki-laki. Inti berita ini adalah mengenai pencuri yang batal melakukan aksinya dan justru memperkosa si pemilik rumah yang dideskripsikan sang jurnalis dengan diksi janda molek (korban) dan nafsu yang membutakan matanya (pemerkosa).

Sebagai komparasi, saya mengambil dua berita lagi; yang pertama dipublikasikan di *Solopos.com* berjudul *PERKOSAAN KLATEN: Pulang Malam, Karyawati Nyaris Jadi Korban Perkosaan*. Inti berita yang kedua ini adalah, karena pulang malam, seorang karyawati di sebuah mal di Sukoharjo, Jateng, nyaris menjadi korban pemerkosaan. Penulis berita ini Suharsi, seorang jurnalis perempuan.

Lalu berita ketiga yang saya pilih berjudul *Denur, Penjual Cilok Berparas Cantik dari Pituruh Purworejo*. Berita ini dipublikasikan di *purworejo24.com* dengan penulis Bayu, seorang jurnalis laki-laki. Tentu ada alasan kuat di balik pemilihan ketiga berita ini. Pertama faktor konten dan selanjutnya faktor penulis. Saya tidak membagi lagi elemen konten dan penulis dalam bentuk yang lebih mikro, seperti penulis laki-laki atau perempuan dan konten kekerasan seksual dan satunya lagi konten ketidakadilan gender karena di sinilah sesungguhnya letak persoalannya.

Dalam perspektif saya, walaupun seolah ketiga konten berita tersebut berlainan, terutama antara berita pertama dan ketiga, sejatinya sudut pandang kedua berita ini sangat berkaitan dan pada akhirnya saling memengaruhi. Keduanya saya bayangkan seperti garis linear pertumbuhan yang mengecil lalu membesar. Akan lebih mudah lagi membayangkan kedua berita ini dalam kerangka teori jendela pecah yang digagas ilmuwan sosial James Q. Wilson dan George L. Kelling. Titik berat teori ini adalah saat ketidakaturan atau pelanggaran kecil dibiarkan terus-menerus, maka lama-kelamaan akan muncul kejahatan besar yang serius di kemudian hari.

Logika teori ini sama dengan pernyataan bahwa tindakan menormalisasi ketidakadilan gender secara terus-menerus tidak hanya akan menghilangkan empati jurnalis pada korban, namun juga menghasilkan sesat logika perihai bagaimana kekerasan seksual terjadi. Jadi, sudut pandang berita pertama sebenarnya berawal dari sudut pandang berita yang ketiga – jika kita lihat seperti berita ringan dan tidak berdampak sangat merusak seperti berita pertama dan kedua. Berita ketiga ini, menurut saya, sejatinya tidak mengandung nilai berita sama sekali. Saya



merujuk nilai berita pada kebutuhan publik akan pencerahan, petunjuk, edukasi, atau bahkan hiburan. Poinnya adalah saat Anda ingin menghibur orang lain, Anda bisa melakukannya tanpa harus merendahkan orang lain.

Kemunculan berita perihal penjual cilok cantik menunjukkan praksis merendahkan dalam bentuk stereotip dan objektifikasi. Berita ini juga makin menebalkan karakter media yang maskulin dengan representasi perempuan sebagai tubuh, bukan kepala. Sederhananya, jika ada pemberitaan mengenai perempuan yang berhasil dalam karier karena isi kepalanya, maka media cenderung tetap melakukan diskriminasi dalam bentuk stereotipe sehingga yang muncul adalah frasa pilot cantik, bankir cantik, politikus cantik, dan sejenisnya.

Ketidakadilan gender yang sejenis juga bisa dengan mudah kita temukan pada frasa/kalimat “tidak melupakan kodrat perempuan untuk memelihara keluarga” (beban ganda), “izin suami” (subordinasi), atau “janda kembang” (kekerasan). Berbasis logika jendela pecah, dengan berhati-hati saya kini bisa melihat bagaimana cara pandang perihal ketidakadilan gender itu telah bertumbuh subur menjadi sudut pandang bias dalam memahami kekerasan seksual hingga akhirnya muncul frasa janda molek pada berita pertama sebagai penyebab seorang laki-laki tidak bisa mengendalikan nafsunya. Dalam berita ini jelas terlihat bahwa si jurnalis gagal menangkap bahwa nafsu yang tak terkendali linear dengan kekerasan dan bukan justru menebalkan janda molek sebagai penyebab kekerasan tersebut.

Kegagalan sama walau lebih tersamar terlihat pada berita kedua yang memunculkan dua stereotipe sekaligus, pertama menjauhkan perempuan dari ruang publik malam hari seolah itu *privilege* laki-laki (bukan justru menggugat sistem keamanan yang lemah) dan yang kedua mengenai stereotipe perempuan lemah sehingga nyaris diperkosa karena salahnya sendiri keluar pada waktu malam atau pada waktu yang masuk dalam gender laki-laki. Yang patut juga diperhatikan dalam berita kedua ini adalah sosok jurnalis yang merupakan seorang perempuan. Jadi, walau di satu sisi saya setuju perihal persoalan media yang diskriminatif sedikit banyak disebabkan minimnya jumlah jurnalis perempuan di Indonesia (berdasarkan survei Aliansi Jurnalis Independen/AJI rasionya adalah 40% jurnalis perempuan dan 60% jurnalis laki-laki), namun sudut pandang tentang kesetaraan gender melampaui jenis kelamin.

Sepanjang 60% jurnalis laki-laki bisa memberikan penghormatan pada perempuan, maka media akan menjadi lebih manusiawi. Sebaliknya, apabila 40% jurnalis perempuan berpikir dengan sudut pandang maskulin, media tetaplah rumah laki-laki yang mengasingkan mereka sendiri. Dengan memahami konteks penulis dan konten ini maka saya membuat kesimpulan bahwa persoalan media yang maskulin sebenarnya sudah terjadi sejak di bagian hulu. Terma hulu yang saya maksud di sini adalah pemberitaan dari aspek ketidakadilan gender yang kemudian menumpuk di bagian hilir berupa pemberitaan kasus kekerasan seksual yang tidak berperspektif korban. Terma ini, dalam pandangan saya, mengandung banyak lapisan yang secara garis besar memerlukan pendekatan komprehensif (pendidikan jurnalis tentang kesetaraan gender dan hak asasi, kebijakan organisasi media yang memprioritaskan konten kesetaraan gender, peran masyarakat dan konsumen media dalam mendorong permintaan pemberitaan yang nonbias) dan solusi yang tidak bisa berdiri sendiri (kolaboratif).

Masalah berat di hulu, terutama minimnya perspektif jurnalis perihal keadilan dan kesetaraan gender yang relatif dibiarkan tanpa penanganan memadai menjadi penyebab utama persoalan di bagian hilir dalam bentuk berita kasus kekerasan seksual yang sesat logika dan diskriminatif. Analoginya seperti kasus kebakaran. Saat ini, perhatian banyak pihak masih lebih terpusat pada bagaimana cara memadamkan api (cara menulis berita tentang kekerasan seksual), bukan pada cara mencegah timbulnya api berbahaya (cara menulis berita yang menghormati perempuan). Di situasi inilah saya melihat pentingnya upaya membangun perspektif baru dari hulu ke hilir melalui program intervensi berbasis kolaborasi dalam rangka membangun ruang aman bagi perempuan di media massa.

Dalam bentuk konkret, saya mengusulkan inovasi ini berupa panduan pemberitaan yang adil. Panduan ini idealnya dilakukan secara kolaboratif oleh Komnas Perempuan dengan melibatkan banyak lembaga, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers, serta organisasi pers. Panduan ini selanjutnya bisa didiseminasikan lewat berbagai pelatihan, uji kompetensi jurnalis, kelas-kelas menulis untuk jurnalis di berbagai organisasi wartawan, dan tentu saja melalui laman Komnas Perempuan. Jadi, dari pada menghadirkan lebih banyak lagi kelas teknik menulis kekerasan

seksual yang berperspektif korban, inovasi yang saya usulkan ini menekankan pada pentingnya pencegahan di tingkat hulu dengan mengubah narasi media yang sangat maskulin dan sensasional menjadi lebih humanis dan memanusiakan perempuan. Dengan demikian, panduan ini tidak akan dimulai dengan teknik menulis yang benar (terutama dalam menulis kasus kekerasan seksual), namun lebih pada mengubah cara pandang jurnalis agar memahami kesetaraan gender dan penghormatan tentang perempuan secara lebih baik.

Cara pandang baru ini penting karena saat kita semua sepakat bahwa pengakuan dan penghormatan suatu kelompok menentukan bagaimana representasi mereka, termasuk di media massa. Sampai di lapisan ini, jelas ada masalah besar. Persoalannya bukan hanya berkuat pada minimnya suara perempuan sebagai narasumber di media (dikutip dari Voaindonesia.com, hasil penelitian Tempo Institute pada 2018 menyebut hanya 11% atau sekitar 2.500-an narasumber perempuan dari hampir 23.000 narasumber yang dikutip media) atau jurnalis yang tak empatik (laporan Indeks Media Inklusif Remotivi pada 2020), namun lebih sistematis dari itu.

Kali ini, saya meminjam cara pikir pendiri salah satu studi wacana kritis, Teun Adrianus van Dijk. Teks yang dihasilkan jurnalis, sebagaimana yang diyakini Van Dijk, tidak akan pernah terlepas dari kognisi sosial wartawan maupun wacana dominan atau ideologi yang dipegang wartawan. Sebagai sebuah teks, berita yang bias gender atau berita yang mempromosikan ketidakadilan gender, dalam kerangka Van Dijk, jangan hanya dilihat dari posisi atau sudut pandang yang berdiri sendiri dari kepala si jurnalis pada saat itu saja atau lepas dari konteks sinkronik. Sebaliknya, memandang sebuah teks tidak bisa dipisahkan dari kognisi sosial dan wacana dominan/ideologi yang mengisi perjalanan panjang kehidupan si jurnalis.

Saat kita bicara perihal kognisi sosial, sebagai contoh, maka sangat penting bagi kita untuk melihat apa dan bagaimana ide-ide maupun nilai-nilai yang dianut oleh seorang jurnalis. Sebab, kognisi sosial yang seringkali ditanamkan sejak masa kanak-kanak ini sangat memengaruhi para jurnalis dalam mempersepsikan gender yang kemudian muncul dalam tulisan mereka. Bias asosiasi ini bisa kita lacak dari sini. Di sisi lain, wacana ideologis seperti patriarki secara sistemik juga memengaruhi cara jurnalis menggambarkan kekerasan seksual dan perempuan di media massa.

Ideologi yang mereka pegang ini menjadi kunci agar kita memahami mengapa jurnalis dan media seringkali menghasilkan berita yang bias dalam masyarakat patriarkis di mana keduanya menjadi bagian. Jadi, apabila kita berharap teks-teks di media ini berubah maka tentu harus ada intervensi yang tujuannya menggugah pikiran kritis jurnalis perihal pentingnya kesetaraan gender. Ini merupakan upaya menantang, walau saya tidak mengatakan sulit, karena pada dasarnya upaya larangan merendahkan martabat orang lain, larangan melakukan diskriminasi dan membuat berita berdasarkan prasangka, hingga larangan membuat berita cabul sebenarnya sudah diatur dalam kode etik wartawan.

Kurang memadainya pemahaman jurnalis pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender menciptakan ruang kosong atau *gap* yang membuat jurnalis gagal menerapkan kode etik dalam pemberitaan yang mengarusutamakan gender. Dalam konteks ini, aturan Dewan Pers No. 2/2024 menjadi relevan karena bertujuan menghilangkan bias gender melalui pelatihan dan program pelaporan yang lebih adil. Namun, menurut saya, aturan ini memerlukan dukungan yang lebih luas, termasuk kolaborasi dengan lembaga lain seperti Komnas Perempuan dan organisasi pers. Lewat kolaborasi inilah, aturan tersebut diterapkan bisa diterapkan secara lebih dengan efektif, yang dimulai dari lingkungan kantor yang bebas dari bias gender hingga pelatihan dan ruang bincang mengenai kesetaraan gender yang diselenggarakan organisasi pers. Panduan pemberitaan yang adil dan berperspektif gender ini, menurut saya, harus menjadi bagian integral dari implementasi aturan tersebut dan disebarkan melalui pelatihan kolaboratif.

Panduan yang disusun Komnas Perempuan terdiri atas dua seri; yang pertama adalah panduan mengenai prinsip-prinsip kesetaraan gender yang menjadi landasan menuju panduan kedua perihal bagaimana cara merepresentasikan perempuan sebagai manusia dalam teks berita yang adil gender dan kemudian berpihak pada korban, khusus untuk berita tentang kekerasan seksual. Intinya adalah teknik seharusnya lahir sesudah pemahaman supaya tidak menjadi teknik yang kosong seperti yang terjadi selama ini hingga membuat jurnalis berkali-kali tergelincir saat konteksnya berubah.

Panduan yang komprehensif dalam menulis tentang perempuan di kultur patriarki ini dapat mendorong media menjadi lebih bertanggung jawab ketika menyoroti isu-isu tersebut. Konten mereka harus membantu warga



memerangi stereotip dan bias yang merugikan perempuan. Melalui panduan yang jelas dan komitmen dalam memperbaiki cara jurnalis meliput isu gender, saya berharap ada langkah konkret menuju keadilan sosial yang lebih luas di mana media dapat memainkan peran vital dalam mendorong perubahan positif dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Eriyanto. (2021). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Revul Andina, T. K. (2023). *Integrasi Perspektif Adil Gender dalam Pemberitaan Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Suwastini, N. K. A. (2013). *Perkembangan Femisme Barat dari Abad XIII hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis*. ISSN: 2303-2898, Vol. 2, No. 1, April 2013. Singaraja: Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Wolf, N. (2004). *Mitos Kecantikan: Kala Kecantikan Menindas Perempuan* (A. Swastika, penerjemah). Yogyakarta: Penerbit Niagara. (Karya asli diterbitkan 2002).

Artikel

- Elkin, L. (2023). The female body under the female gaze poses a monster problem. Aeon. <https://aeon.co/essays/the-female-body-under-the-female-gaze-poses-a-monster-problem>.
- Percy, J. (2023, August 22). What People Misunderstand About Rape. The New York Times. Diakses dari <https://www.nytimes.com/2023/08/22/magazine/immobility-rape-trauma-freeze.html>.
- Stokes, R. (2020, April 2). The problem of gendered language is universal – How AI reveals media bias. The Guardian. Diakses dari <https://www.theguardian.com/careers/2020/apr/02/the-problem-of-gendered-language-is-universal-how-ai-reveals-media-bias>.
- Webber, J. (2018). Against type. Aeon. <https://aeon.co/essays/against-type>. Diakses dari <https://aeon.co/essays/what-existentialist-philosophy-reveals-about-prejudices>.
- Wollstonecraft, M. (2022). To end patriarchy, woman must first seize power over herself. Aeon. <https://aeon.co/classics/to-end-patriarchy-woman-must-first-seize-power-over-herself>.

Berita

- VOA Indonesia. (2019). Pemberitaan Media di Indonesia Masih Bias Gender. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/pemberitaan-media-di-indonesia-masih-bias-gender/5032225.html>
- Purworejo24.com. (2020). Denur, Penjual Cilok Berparas Cantik dari Pituruh Purworejo. Diakses dari <https://www.purworejo24.com/2020/10/12/denur-penjual-cilok-berparas-cantik-dari-pituruh-purworejo>.
- JPNN.com. (2022, May 12). Harta sudah di tangan, tetapi tubuh janda bikin enggak tahan. JPNN.com. Diakses dari <https://m.jpnn.com/news/harta-sudah-di-tangan-tetapi-tubuh-janda-bikin-enggak-tahan>.
- Solopos. (2023). Perkosaan Klaten: Pulang Malam, Karyawati Nyaris Jadi Korban Perkosaan. Diakses dari <https://soloraya.solopos.com/perkosaan-klaten-pulang-malam-karyawati-nyaris-jadi-korban-perkosaan-780907>.
- iNews. (2023). Pulang Larut Malam, Perempuan Muda di Jambi Diperkosa Kuli Bangunan. Diakses dari <https://regional.inews.id/berita/pulang-larut-malam-perempuan-muda-di-jambi-diperkosa-kuli-bangunan>.
- Fimela. (2023). Tiara Alincia Buktikan Perempuan Mampu Menjadi Masinis MRT dan Tetap Bisa Membagi Waktu dengan Keluarga. Diakses dari <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5237760/tiara-alincia-buktikan-perempuan-mampu-menjadi-masinis-mrt-dan-tetap-bisa-membagi-waktu-dengan-keluarga?page=2>.

Surat Edaran

- Peraturan Dewan Pers Nomor: 02/Peraturan-Dp/Iv/2024 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pers.

